



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS KESEHATAN

2023

EXECUTIVE SUMMARY



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra Dinas Kesehatan 2018-2023). Secara keseluruhan, LAKIP ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut sebanyak 10 IKU. Simpulan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023.



Dinas Kesehatan kabupaten Bone merupakan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan, yang dipimpin oleh kepala Dinas kesehatan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Visi Dinas Kesehatan kab. Bone yang juga merupakan Visi Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yaitu "Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera".

CAPAIAN KINERJA

Secara umum, capaian kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Bone tahun 2023 digambarkan sebagai berikut Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari 10 indikator kinerja capaiannya adalah sebesar 88,40%. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai apa yang ditargetkan pada tahun 2023 ini, meskipun demikian, ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya diatas target kinerja. Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan ataupun peluang solusi yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Kab. Bone ke depan

DAFTAR

PENDAHULUAN

Gambaran Umum
Organisasi Dinas Kesehatan
Isu Strategis
Aspek Strategis Organisasi

PERENCANAAN KINERJA

Tugas dan sasaran
Strategis dan Arah Kebijakan
Indikator Kinerja Utama
Perjanjian Kinerja
Standar Penilaian Kinerja

AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi Capaian Kinerja
Perbandingan dengan Jangka Menengah (Renstra)
Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisa Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja
Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

PENUTUP

Kesimpulan

Lampiran



PENDAHULUAN



*"Kesehatan bukan hanya
tentang apa yang kamu makan.
Ini tentang apa yang kamu
pikirkan dan rasakan juga"*

Penelusuran Oleh Tim TPKJM



GAMBARAN UMUM

Dalam upaya penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat daerah



Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

LKj Dinas Kesehatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Kepala Dinas

Sekertriati



**Subag
Program**

**Subag Umum dan
Kepengawalaan**

**Subag
Keuangan**

**Bidang Kesehatan
Masyarakat**

**Bidang Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit**

**Bidang Pelayanan
Kesehatan**

**Bidang Sumber Daya
Kesehatan**

**Kelompok Jabatan
Fungsional**



Sumber data : Perbup No 16 Tahun 2023 tentang SOTK

Komposisi SDM dan sarana

S D M

Dalam cakupan yang lebih luas, tenaga kesehatan bekerja bersama-sama dengan tenaga pendukung kesehatan (allied health professions) seperti ilmuwan laboratorium medis, ahli gizi, dan para pekerja sosial lainnya. Mereka tak hanya bekerja sama di rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya, tetapi juga dalam pelatihan akademik, penelitian, dan urusan administrasi. Manajer layanan kesehatan, teknisi informasi kesehatan, dan personel-personel pendukung lainnya juga dianggap sebagai bagian penting dari tim pelayanan kesehatan. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Kesehatan yang **merata dan berkeadilan**, pemanfaatan Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Kesehatan, termasuk peningkatan karier.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.



Tenaga kesehatan terdiri dari : tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Total Tenaga medis dan paramedis sesuai pemenuhan 9 jenis nakes yang tersebar di 38 PKM dan Rumah Sakit di Kabupaten Bone Tahun 2023 sebanyak 13757, hal ini dapat di lihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Persebaran Tenaga Kesehatan Kab. Bone Tahun 2023

Tenaga Kesehatan	Puskesmas			RS		
	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
Dokter / Spesialis	15	56	71	42	71	113
Dokter Gigi	6	37	43	2	8	10
Perawat	152	706	858	128	481	609
Bidan		1468	1468		237	237
Kesehatan Masyarkat	34	118	152	12	33	45
Kesehatan Lingkungan	8	51	59	3	6	9
Farmasi	5	80	85	5	66	71
Gizi	8	59	67	3	23	26
ATLM	6	36	42	19	37	56
Jumlah	234	2611	2845	5456	8301	13757

Sumber Data : Sis_SDMK Tahun 2023



Sarana



Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Pesebaran Puskesmas di wilayah Kab. Bone tahun 2023 yang tersebar di 27 Kecamatan sebanyak 38 Puskesmas. Jumlah tempat tidur di Puskesmas Perawatan (Rawat Inap) sebanyak 254 unit. Jumlah Puskesmas PONED sebanyak 4 unit.

Tabel 1.2

Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana Tahun 2023

No.	Kegiatan	Tahun
1	Rehabilitasi Gudang Farmasi	2023
2	Pembangunan Labkesda BLS-2	2023
3	Rehabilitasi Rumdis Gaya Baru	2023
4	Rehabilitasi Rumdis Salomekko	2023
5	Rehabilitasi Rumdis Bontocani	2023
6	Rehabilitasi Rumdis Tellu Siattinge	2023
7	Rehabilitasi PUSTU Bontocani	2023
8	Rehabilitasi PUSTU Mallusetasi	2023



Pelayanan laboratorium merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan penyakit ataupun virus yang semakin variatif maka sarana dan prasarana Laboratorium selalu ditingkatkan untuk menghadapi berkembangnya penyakit infeksi. Untuk mengantisipasi fenomena penyebaran penyakit infeksi dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga perlu diadakan peningkatan Laboratorium di wilayah kabupaten Bone menjadi BSL-2 guna mengantisipasi penyebaran penyakit infeksi saat ini maupun dimasa mendatang.

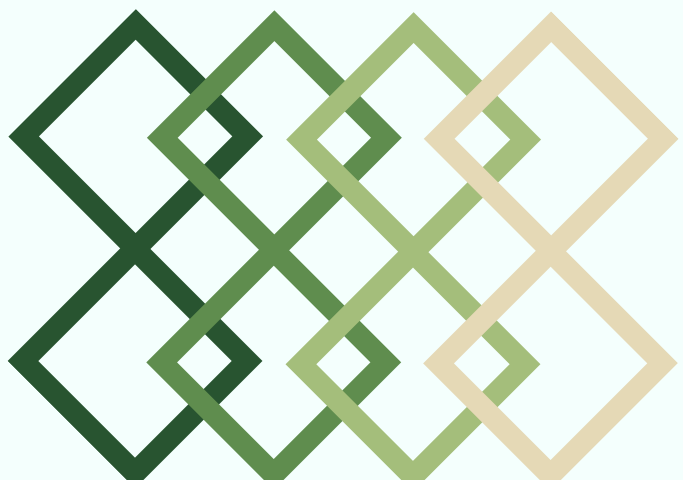
C. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Bone berdasarkan Sumber Daya dan Evaluasi kinerja pelayanan umum dan khusus, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah

Permasalahan



- Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya;
- Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat;
- Pelayanan Kesehatan Masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh baik dari aspek jenis pelayanan (Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas), Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS), Pelayanan Kesehatan Tradisional), aspek peralatan kesehatan maupun dari aspek lain;
- Masih kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan dalam hal pemeliharaan, inventarisasi dan kalibrasi alat kesehatan;
- Kurang optimalnya penanganan kesehatan saat terjadi bencana;
- Masih perlu pengawasan intensif terhadap pengedaran obat dan makanan terhadap masyarakat;
- Masih Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Kabupaten Bone;
- Masih tingginya angka kekurangan gizi pada Balita terutama Balita Stunting;
- Masih rendahnya Cakupan Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi standar;
- Belum Semua Kecamatan, desa dan kelurahan melakukan Proses Kawasan Sehat secara Standar;
- Masih rendahnya Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),
- Masih tingginya Angka kejadian penyakit menular dan tidak menular, penemuan kasus masih rendah dan pengobatan yang belum sesuai standar;
- Belum semua desa/kelurahan berstatus Universal Child Immunization (UCI);
- Masih tingginya angka penduduk miskin sehingga perlu intervensi terhadap dampak kemiskinan di bidang kesehatan;
- Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita;
- Masih rendahnya akses layanan Kesehatan Lansia;





- Masih tingginya penderita gangguan penglihatan;
- Masih ada pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung;
- Perlunya Peningkatan mutu pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Belum sesuainya Alat kesehatan dengan standar Rumah Sakit yang ada;
- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum memenuhi standar;
- Sistem Informasi dan Manajemen di Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terintegrasi optimal;
- Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan;
- Masih rendahnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- Masih rendahnya pelayanan Kesehatan pada anak usia Pendidikan dasar;
- Masih rendahnya Pelayanan Kesehatan reproduksi;

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023

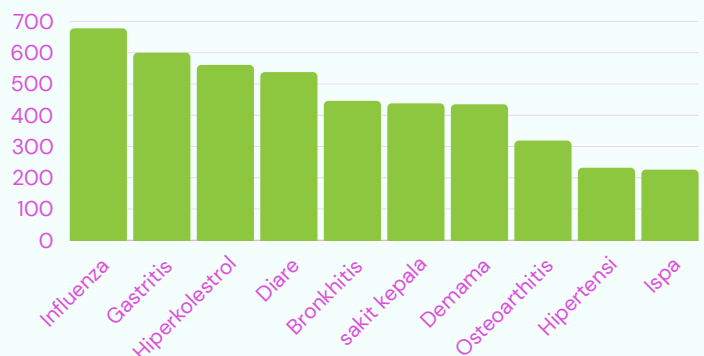


SCAN ME!

Strategies

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan tenaga kesehatan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none">• Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan• Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil

Grafik 1.1
10 Penyakit Terbesar Th. 2023



Data Kesakitan (LBI), sepanjang tahun 2023 tercatat 10 (sepuluh) besar penyakit yang mendominasi penduduk di wilayah Kab. Bone

D. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai misi dan visi oleh Bupati Bone terpilih, Dinas Kesehatan berperan dalam dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai RPJM lima tahun. Adapun tujuannya adalah “MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT” dimana sarannya adalah Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan Masyarakat. Program pembangunan Daerah di Bidang Kesehatan dijabarkan dari Program Prioritas sesuai Permendagri 90 Tahun 2019. Dinas Kesehatan sebagai pengampu tugas dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan tenaga Kesehatan yang berkualitas.

Pemetaan Program Prioritas

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018–2023

Dalam mewujudkan tujuan diatas, Dinas Kesehatan telah memberikan sumbangsih dengan diraihnya beberapa penghargaan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Adapun penghargaan yang diperoleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut

1. Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat dan STBM Tahun 2023 oleh Kementerian Kesehatan.
2. Inovasi Aksi perubahan oleh A. Bahza, SKM, M.kes dengan judul SIPELAKU DIGITAL, yang memuat pelaporan keuangan secara DIGITAL
3. Inovasi oleh Nurlina, S.ST, M.kes dengan judul Inovasi TEMMACAPA MUA yang berisi pencatatan, pelaporan Obat, BMHP dan Alkes.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA





A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kepala daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

VISI dan MISI

**MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA**

TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN 2021 - 2023

Tabel. 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Target Kinerja Pada Tahun ke					Realisasi Kinerja Pada tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif	Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Persentase Balita Stunting	7,47	7,42	7,37	7,32	7,27	120,61	115,09	114,3	118,43	154,88
		Angka Kematian Bayi	6,56	6,59	6,54	6,49	6,44	192,07	135,66	168,5	99,53	105,12
		Angka Kematian Ibu	67,00	66,00	65,00	64,00	63,00	108,8	121,06	70,42	58,12	17,23
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,32	0,76	0,74	0,72	0,70	168,75	101,30	185,10	180	185,71
		Cakupan Desa dan Kelurahan Sehat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Keluarga Sehat	0,16	0,15	0,30	0,50	0,80	110	129,6	75	100	38,75
		Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Angka Kejadian Malaria	<1	<1	<1	<1	100	100	100	100	100	100
		Prevalensi HIV/AIDS	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	80,01	180	80		100
		Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi	100	100	100	100	100			100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Th. 2019-2023

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka selanjutnya dirumuskan berbagai strategi yang disajikan dalam sebuah matriks keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Bone Tahun 2023

VISI	Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera		
MISI III	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar
			Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan
			Percepatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
			Pemanfaatan pusat layanan keselamatan terpadu (tenaga medis dan paramedik-pemadam kebakaran-penanganan bencana)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Serta pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
			Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
			Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
			Peningkatan kualitas data dan informasi kesehatan
			Peningkatan pengawasan peredaran obat, obat tradisional, narkotika dan kosmetik, makanan/minuman dan perbekalan kesehatan

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang disesuaikan dengan masing-masing strategi yang telah dipilih. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Terdapat sejumlah strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota dan pedesaan serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat, maka kebijakan pembangunan kesehatan yang ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
		2021	2022	2023
1	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan tenaga kesehatan yang berkualitas	Akselerasi Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan	Akselerasi pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Diseluruh kecamatan	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan
		Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil	Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil	Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Kesehatan telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel. 2.4
IKU Dinas Kesehatan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA			SUMBER DATA	P. JAWAB
Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Persentase Balita Stunting	Jumlah Balita Pendek + Balita Sangat Pendek	x	100	Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG)	Bidang Kesmas dan Yankes
		Jumlah Balita yg di Ukur Panjang/Tinggi Badan				
	Angka Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi (berumur < 1 tahun) pada satu tahun tertentu	x	100	Format Laporan Kematian Bayi & Balita	
		Jumlah Kelahiran Hidup pada Satu Tahun Tertentu				
	Angka Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin & Nifas di suatu wil. tertentu selama 1 tahun	x	100	Format Laporan Kematian Ibu	
		Jumlah kelahiran hidup diwilayah tersebut & pd kurun waktu yg sama				
	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	x	100	Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG)	
		Jumlah Balita yang di Ukur Berat Badan				
	Cakupan Desa dan Kelurahan Sehat	Jumlah Desa dan Kelurahan Sehat	x	100	Laporan Cakupan Desa & Kel. Sehat	
		Jumlah Seluruh Desa dan Kelurahan				
	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Indikator Keluarga Sehat yang bernilai 1			Aplikasi Keluarga Sehat	
		12 – Jumlah Indikator yang tidak ada di keluarga				
	Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit DBD	Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama satu tahun	x	100	Rekap Laporan Bulanan P2	Bidang P2
		Jumlah Penderita DBD yang ditemukan di satU wilayah dalam kurun waktu yang sama				
	Angka Kejadian Malaria	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	x	100	SISMAL (Sistem Malaria) Terpadu	
		Jumlah Penduduk pada Pertengahan Tahun				
	Prevalensi HIV/AIDS	Jumlah Pasien HIV & AIDS disatu wil. kerja dlm kurun waktu tertentu	x	100	Sistem Informasi HIV-AIDS (SIHA)	
		Jumlah Penduduk di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama				
Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi	Jumlah Fasilitas yang terakreditasi	x	100	Hasil Akreditasi	Bidang Yankes	
	Jumlah Fasilitas Kesehatan				Bidang SDK	

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023



d. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2023, IKU dan APBD. Dinas Kesehatan telah menetapkan PK sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
Membaiknya Layanan Kesehatan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Balita Stunting	7,32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 72.000.621.167
	Angka Kematian Bayi	6,49		
	Angka Kematian Ibu	64,00		
	Persentase Balita Gizi Buruk	0,72	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 312.647.898.668
	Cakupan Desa dan Kelurahan Sehat	100		
	Indeks Keluarga Sehat	0,50	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 3.760.389.930
	Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit DBD	100		
	Angka Kejadian Malaria	<1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 3.134.947.991
	Prevalensi HIV/AIDS	<0,05		
	Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp 335.122.000
	Jumlah			391.878.979.756

Sumber Data : DPPA Dinas Kesehatan Th. 2023



PK Perubahan Th. 2023

e. Standar Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kesehatan Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Nilai (%)	Pencapaian
110 Keatas	Sangat Tercapai / Sangat Berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai / Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup Tercapai / Cukup Berhasil
$x < 60$	Tidak Tercapai / Tidak Berhasil

Rumus Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja	=	Realisasi	x	100%
		Target		
Capaian Indikator Kinerja	=	(Target - (Realisasi - Target))	x	100%
		Target		



Bab III

Akuntabilitas Kinerja



A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI



1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang Secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target 2023	Realisasi	Capaian	Keterangan
Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,70	0,10	185,71	Sangat Berhasil
	Cakupan Desa / Kelurahan Sehat (%)	100	100	100	Berhasil
	Persentase Balita Stunting (%)	7,27	3,28	154,88	Sangat Berhasil
	Angka Kematian Bayi	6,44	6,11	105,12	Sangat Berhasil
	Angka Kematian Ibu	63,00	115,14	17,23	Tidak Tercapai
	Indeks Keluarga Sehat	0,80	0,31	38,75	Tidak Tercapai
	Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	Berhasil
	Angka Kejadian Malaria	<1	0,006	100	Berhasil
	Prevalensi HIV/AIDS	<0,05	0,01	100	Berhasil
	Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi	100	100	100	Berhasil
	Rata-Rata Capaian			88,40	

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Bone Tahun 2023

2. Realisasi Capaian Kinerja

Tabel. 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2018–2023

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2019	2020	2021	2022	2023
Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,82	0,75	0,11	0,14	0,10
	Cakupan Desa / Kelurahan Sehat	100	100	100	100	100
	Persentase Balita Stunting (%)	5,4	6,3	6,31	5,93	3,28
	Angka Kematian Bayi	5,25	4,24	2,06	6,52	6,11
	Angka Kematian Ibu	61,05	52,1	84,23	57,78	115,14
	Indeks Keluarga Sehat	0,16	0,20	0,22	0,30	0,31
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100
	Angka Kejadian Malaria	0,01	0,01	0,05	0,07	0,006
	Prevalensi HIV/AIDS	0,06	0,01	0,06	0,1	0,01
	Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi			100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Bone Tahun 2023

Dari tabel diatas 10 indikator dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan kenaikan. Fluktuasi yang terjadi dalam pencapaian kinerja dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan dari 10 indikator IKU diatas yang masih menjadi catatan penting bagi Dinas Kesehatan adalah Angka Kematian Ibu, dimana capaiannya ditahun 2021 dan 2023 meningkat.

Ditahun 2022 Angka kematian Ibu menunjukkan ada peningkatan dari 57,78 menjadi 115,14 yaitu sebesar 57,36. Angka tersebut sangatlah tinggi dibanding dengan peningkatan dari tahun sebelumnya (2020 ke 2021) yaitu sebesar 32,13.

Selain dari Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) kesembilan Indikator lainnya menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya.

3. Perbandingan dengan Jangka Menengah (RENSTRA)

Tabel. 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

SASARAN	INDIKATOR	Target Jangka Menengah	Realisasi 2023	Persentase Capaian
Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	0,26	0,10	161,54
	Persentase Desa / Kelurahan Sehat (%)	100	100	100
	Persentase Balita Stunting (%)	7,27	3,28	154,88
	Angka Kematian Bayi	6,44	0,61	190,53
	Angka Kematian Ibu	63,00	115,14	17,23
	Indeks Keluarga Sehat	0,166	0,31	13,25
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	100	100	100
	Angka Kejadian Malaria (per 100 penduduk)	< 1	0,006	100
	Prevalensi HIV / AIDS (per 1000 penduduk)	0,05	0,01	100
	Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Bone Tahun 2023

Dilihat dari table diatas perbandingan antara target Renstra dengan capaian kinerja tahun 2023 bila dirata ratakan sudah berhasil. Adapun yang masih perlu ditingkat capaiannya adalah pada poin Angka kematian Ibu yang capaiannya masih 17,23, dimana tahun 2023 ini mengalami peningkatan kematian sebesar 13 kasus . Dimana Indeks keluarga sehat juga masih ditingkat lagi, mengingat realisasi capaian kinerja masih belum memenuhi target yang telah ditentukan.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Tabel. 3.4
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	Realisasi Kinerja 2023	Standar Nasional	
			Target 2023	Realisasi 2023
Membaiknya layanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	0,10	7,8	0,10
	Persentase Desa / Kelurahan Sehat (%)	100	100	100
	Persentase Balita Stunting (%)	3,28	0,14	3,28
	Angka Kematian Bayi	0,61	16/1.000 Kelahiran Hidup	0,61
	Angka Kematian Ibu	97,43	183/100.000 Kelahiran Hidup	97,43
	Indeks Keluarga Sehat	0,31	0,8	0,31
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	100	< 49 / 100.000 penduduk	100
	Angka Kejadian Malaria (per 100 penduduk)	0,006	APV < 1 / 1000 Penduduk	0,006
	Prevalensi HIV / AIDS (per 1000 penduduk)	0,01	0,05	0,01
	Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi	100		100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Bone Tahun 2023

5. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Kota sekitar.

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran Membaiknya layanan kesehatan kepadaseluruh lapisan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama adalah dengan membandingkan dengan realisasi kinerja Kabupaten / Kota sekitar sebagaimana table berikut :

Tabel. 3.5
Realisasi Kinerja Kabupaten / Kota Sekitar

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kabupaten		
	Soppeng	Sinjai	Bone
Prevalensi Balita Stunting	9,98	20	3,28
Angka Kematian Ibu	112,82	77	115,15
Angka Kematian Bayi	15,42	24,7	6,11

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Bone, Soppeng dan Sinjai Tahun 2023

Berdasarkan data diatas realisasi Indikator Kinerja Utama yang sama dengan dua kabupaten sekitar yaitu Soppeng dan Sinjai. Kabupaten Bone untuk capaian prevalensi Balita Stunting sudah melampaui kabupaten Soppeng, Sinjai akan tetapi belum memenuhi target Nasional yaitu 0,14. Untuk angka AKI dan AKB Kabupaten Bone juga realisasinya juga melampaui nilai dari 2 kabupaten diatas.



Presiden telah menargetkan pada 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%. Stranas Stunting memaparkan Lima Pilar, Lima Pilar tersebut adalah:

- 1) Komitmen dan visi pemimpin tertinggi negara;
- 2) Kampanye nasional berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas;
- 3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat;
- 4) Mendorong kebijakan ketahanan pangan dan
- 5) Pemantauan dan evaluasi. Di samping itu, juga ditetapkan Kementerian /Lembaga penanggung jawab upaya percepatan pencegahan stunting, wilayah prioritas dan strategi percepatan pencegahan stunting, serta menyiapkan strategi kampanye nasional stunting.

Sebagaimana diketahui bahwa target SDG's tahun 2023 adalah menurunkan Angka Kematian Balita (AKABA) menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup. AKABA adalah jumlah kematian anak berusia 1-5 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Menurut laporan World Health Organization (WHO), penyebab langsung kematian ibu terjadi saat dan pasca-melahirkan. 75 persen kasus kematian ibu diakibatkan oleh perdarahan, infeksi, atau tekanan darah tinggi saat kehamilan. Target Nasional untuk Angka kematian Ibu adalah 183/100.000 Kelahiran Hidup. Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan. Kematian ibu dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan, bersalin, dan nifas



Secara nasional target angka kesakitan atau kasus DBD di Indonesia yakni 49 per 100.000 penduduk. Pemerintah menargetkan pada 2024 sebanyak 405 kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria. Periode 2020-2024 merupakan periode penting dan menentukan dalam upaya mencapai Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030.

Sesuai Permendagri No.100 Tahun 2018 untuk bidang kesehatan dan PMK nomor 4/2019 ada 12 standar pelayanan dimana program HIV AIDS merupakan Standar Pelayanan Minimal/SPM nomor 12 yaitu pelayanan bagi orang yang berisiko terinfeksi HIV dimana kelompok sasaran adalah Ibu Hamil, Pasien TBC, Pasien IMS, Warga Bina Permasyarakatan, WPS, LSL, Transgender/Waria dan Pengguna Napza Suntik. Upaya pencegahan dan pengendalian HIV -AIDS bertujuan untuk mewujudkan target Three Zero pada 2030, antara lain tidak ada lagi penularan infeksi baru HIV, tidak ada lagi kematian akibat AIDS, dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Target global untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030, maka Indonesia telah menetapkan untuk mencapai 90-90 -90 dan three zero/3.0 HIV AIDS dan PIMS pada tahun 2020-2024.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	% Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d	60= \leq s/d	<60
				<110	<90	<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	0,10	185,71	Ö			
	Cakupan Desa / Kelurahan Sehat	100	100		Ö		
	Persentase Balita Stunting	7,27	154,88	Ö			
	Angka Kematian Bayi	6,44	190,53	Ö			
	Angka Kematian Ibu	63,00	45,34				Ö
	Indeks Keluarga Sehat	0,80	38,75				Ö
	Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100		Ö		
	Angka Kejadian Malaria	<1	100		Ö		
	Prevalensi HIV/AIDS	<0,05	100		Ö		
	Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi	100	100		Ö		
	Rata		88,40			Ö	

Dari Sasaran Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan terdapat 10 indikator, 10 indikator ini didukung oleh Program sesuai Permendagri 90 Tahun 2012 yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat serta Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

*"Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat."
- Tony Robbins*

Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :



Pencapaian indikator cakupan penemuan dan penanganan DBD dan Malaria dengan nilai capaian 100% , jumlah kasus DBD tahun 2023 sebanyak 64 kasus, 1 meninggal, dan kasus malaria sebanyak 54 kasus positif.

Pencapaian ini termasuk dalam kategori capaian Berhasil Pencapaian indikator Prevalensi HIV / AIDS (per 1000 penduduk) tahun 2023 capaiannya adalah 0,01 dengan jumlah kasus positif sebanyak 95, pencapaian ini termasuk dalam kategori capaian Berhasil .

Pencapaian indikator Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi di tahun 2023 adalah 100, dimana 38 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bone sudah terakreditasi

Pencapaian indikator persentase Balita Gizi Buruk yaitu 0,10, pencapaian ini termasuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil dengan nilai persentase capaian yaitu 185%

Pencapaian indikator persentase Desa / klurahan Sehat yaitu 100, pencapaian ini termasuk dalam kategori capaian Berhasil dengan nilai persentase capaian yaitu 100%

Pencapaian indikator persentase balita Stunting yaitu 7,27, pencapaian ini termasuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil dengan nilai persentase capaian yaitu 154,88, walaupun nilai 7,27 ini masih belum mencapai target nasional yaitu 14%

Pencapaian indikator Angka Kematian Bayi yaitu 6,44 dengan jumlah 69 kasus. Pencapaian ini termasuk dalam kategori Berhasil dengan nilai persentase capaian yaitu 190.53. Target nasional untuk angka kematian bayi adalah 16/1.000 kelahiran hidup.

Pencapaian indikator Angka Kematian Ibu yaitu 63,00. Pencapaian ini termasuk dalam kategori capaian Tidak Berhasil dengan nilai persentase capaian yaitu 45,34. Jumlah kasus kematian ibu di tahun 2023 sebanyak 13 kematian.

Pencapaian indikator Indeks keluarga Sehat yaitu 0,31. Pencapaian ini termasuk dalam kategori capaian Tidak Berhasil dengan nilai persentase capaian yaitu 38,75, adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 0,31 dan tahun ini Kab. Bone berada pada peringkat ke 14.

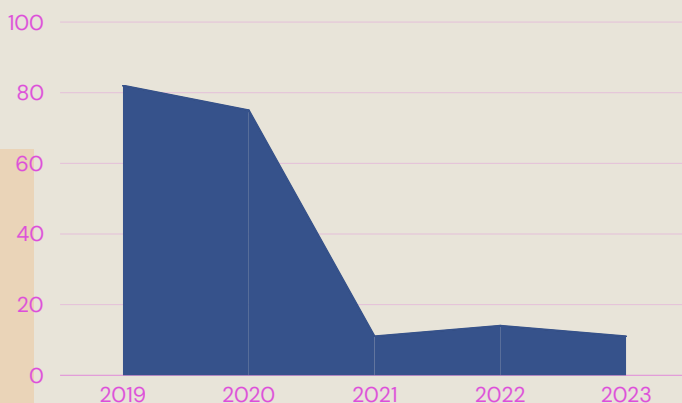
Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

» Persentasi Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan keadaan kekurangan gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Selain kekurangan energi dan zat gizi makro, terutamaprotein, penderita gizi buruk juga mengalami defisiensi zat gizi mikro (vitamin dan mineral).

Target indikator persentase Balita Gizi Buruk tahun 2023 yaitu 0,10, ada penurunan dari tahun 2022 yaitu 0,14. dan hasil capaian yang telah dilakukan sebesar 185,71. Dimana angkat tersebut didapatkan dari jumlah kasus Gizi buruk dibagi jumlah balita. Angka terseut dapat dijlaskan pada rumus ini :

Tabel. 3.1
Persentase Balitas Gizi Buruk Tahun 2019–2023



Faktor pendukung :

- Bayi dan balita rata-rata sudah terpantau pertumbuhan perkembangannya oleh tenaga Kesehatan mulai dari Posyandu dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- Telah dilakukan kelas ibu balita sehingga masyarakat dapat memberikan pola asuh kepada balita yang lebih baik.
- Telah dilakukan SDIDTK di Posyandu dan fasilitas Kesehatan
- Dilakukan pemberian makanan tambahan (PMT) untk bayi dan balita dengan mengusung bahan-bahan lokal (PMT Lokal) yang mudah ditemui dipasar, sehingga ibu-ibu dapat mempraktekkan dirumah.
- Pemantauan oleh pengelola program Gizi melalui grup WA se-Kabupaten Bone untuk mempermudah pelaporan dan cepat tanggap apabila ditemukan kasus balita gizi buruk.

· Persentase Balita Gizi Buruk :			
Jumlah Balita Gizi Buruk	48	X 100	0,11
Jumlah Balita	43751		
· Persentase Capaian :			
(0,70-(0,11-0,70))	X 100	184,28	
0,70			

Untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan asuhan gizi di Puskesmas secara berkala dilakukan dengan pencatatan dan pelaporan melalui formulir pencatatan dan aplikasi Online E-PPGM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Upaya perbaikan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat yang dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Tahun 2023 persentase Balita Gizi Buruk telah memenuhi target, dan diharapkan untuk tahun kedepannya capaian ini dapat meningkat sehingga balita di Kabupaten Bone khususnya bebas dari Gizi buruk.

Untuk mewujudkan harapan diatas perlu perhatian khusus, dimana gizi buruk bisa dicegah dengan melakukan beberapa upaya berikut ini :

- Memberikan makanan bergizi lengkap dan seimbang sesuai kebutuhan anak.
- Menerapkan pola asuh yang baik.
- Memberikan ASI eksklusif hingga usia anak 6 bulan, dilanjutkan dengan memberikan MPASI yang bergizi lengkap dan seimbang.
- Mengukur tinggi dan berat badan anak secara berkala.
- Membawa anak untuk segera berobat bila terkena penyakit infeksi.

Tingkat Gizi Buruk di Indonesia masih tinggi, pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan memperkenalkan PGBT (Orientasi Pengelolaan Gizi Terintegrasi), dimana kegiatan ini adalah melakukan pendekatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan pengobatan anak penderita balita gizi, melakukan identifikasi kasus balita kurus sedini mungkin sebelum terjadi komplikasi dan melakukan perawatan terhadap anak balita kurus/sangat kurus sesuai pedoman Tatalaksana PGBT. Sehingga tahun 2023 ini Dinas kesehatan melibatkan 38 Puskesmas dengan mengikut sertakan Dokter, Perawat/Bidan, Tenaga Gizi untuk mengikuti Bimtek tentang PGBT ini, sehingga penanganan Gizi Buruk dapat ditangani sesuai SOP Puskesmas yang telah dibuat.



Cakupan Desa / Kelurahan Sehat



Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Sebelum penyelenggaraan Kabupaten Sehat kegiatan ini bermula dari Desa siaga kemudian menjadi Kabupaten Sehat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui "FORUM" atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.

Forum tersebut disebut "FORUM KABUPATEN/KOTA SEHAT" atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bone menargetkan raih penghargaan tertinggi kabupaten sehat, atau Swasti Saba Wistara, dan hal tersebut dapat diwujudkan pada tahun 2019. Hal ini dapat terwujud berkat kerjasama antara lintas sektor dan terutama peran serta masyarakat yang telah bersinergi dengan pemerintah. Terlebih kepada peran FKBS, FKKS dan Pokja Kelurahan/Desa dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat



Persentase Balita Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: Kesulitan belajar. Penyakit jantung dan pembuluh darah

Tahun 2019 menjadi tahun Fokus penanganan Stunting di Kabupaten Bone. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Persentase Stunting Kab. Bone pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 37,3%. Pada tahun 2019

Bupati Bone telah menandatangani “komitmen upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting”. Sesuai dengan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting pada Pilar 1 tentang Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara



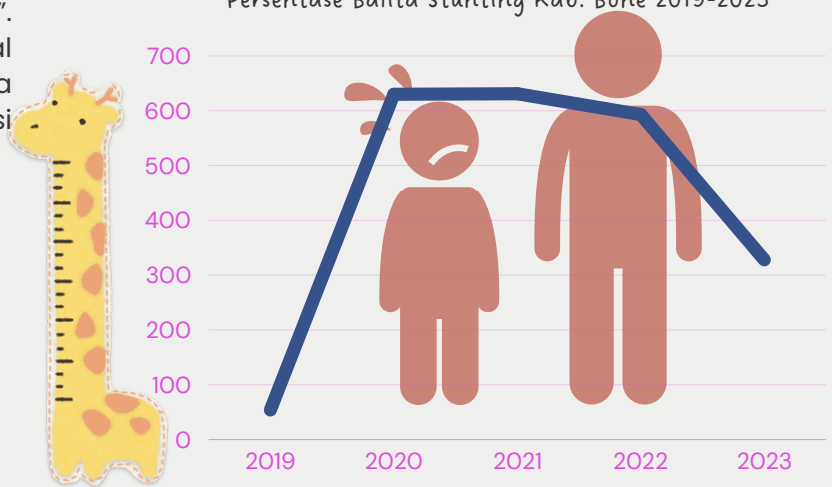
• Persentase Balita Stunting :

Jumlah Balita Stunting	1436	X 100	3,28
Jumlah Balita	43751		

• Persentase Capaian :

(7,27-(3,28-7,27))	X 100	154,88
7,27		

Grafik 3.2
Persentase Balita Stunting Kab. Bone 2019-2023



Persentase Balita Stunting diperoleh dari =
elektronik – Pencatatan dan Pelaporan Gizi
Berbasis Masyarakat
(e-PPGBM).

Dari tabel diatas menunjukkan penurunan kasus balita stunting di Kab. Bone, Tahun 2022 jumlah kasus sebanyak 3072 (5,93) dan 2023 menurun menjadi 1436 (3,28), jumlah penurunan sebanyak 1636 (2,65)

Faktor pendukung :

- Keterlibatan pemerintah dan OPD terkait secara konvergensi dan penanganan stunting
- Terbentuknya Tim Koordinasi Pecepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Bone
- Adanya dukungan regulasi Daerah untuk upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bone Dukungan program dan anggaran penurunan stunting dari Kementerian terkait kepada Kabupaten Bone sebagai lokus intervensi pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023
- Dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Posyandu dan fasilitas Kesehatan secara berkesinambungan
- Telah diberikan vitamin dan taboring pada balita
- Telah diberikan makanan tambahan (PMT) pada bayi dan balita
- Melatih kader Posyandu untuk peningkatan kapasitas kader

Penurunan Persentase Balita Stunting terjadi karena sudah optimalnya pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting baik dalam hal jenis intervensi program maupun jumlah desa/kelurahan yang diintervensi.

Aksi #1 Melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.

Aksi #2 Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi

Aksi #3 Menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota.

Aksi #4 Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.

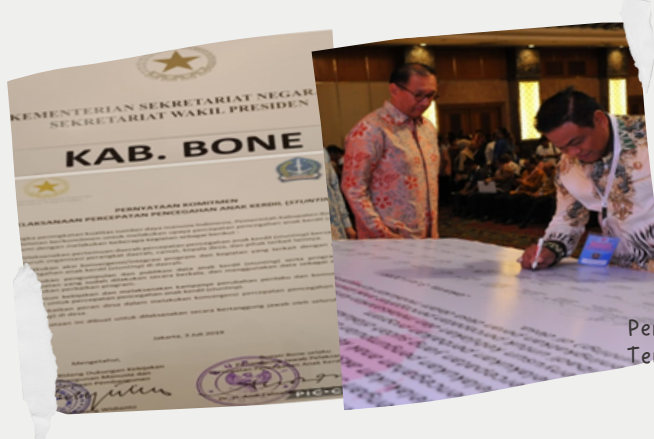
8 aksi konvergensi

Aksi #5 Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.

Aksi #6 Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.

Aksi #7 Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota.

Aksi #8 Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.



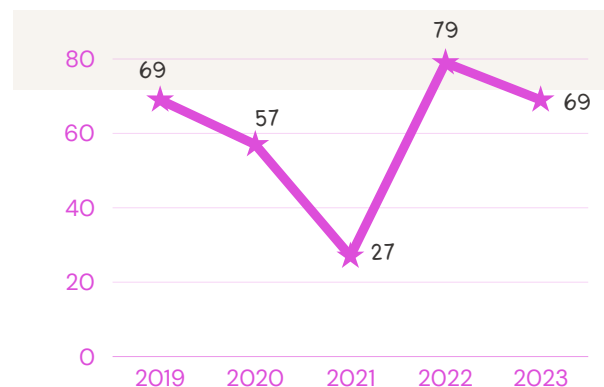
Penandatanganan Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara oleh Bupati Bone

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKBy) adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kegunaan: AKB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat.

• Angka Kematian Bayi 2023 :			
Jumlah Kematian Bayi	69	X 1000	6,11
Jumlah lahir Hidup	11290		
• Persentase Capaian 2023 :			
(6,44-(6,11-6,44))	X 100	105,12	
6,44			

Grafik 3.3
AKB Kab. Bone Tahun 2019-2023



Dari grafik diatas menggambarkan kondisi kejadian kematian bayi di Kab. Bone selama 5 tahun terakhir, dimana angka tertinggi mencapai 79 kasus kematian, yaitu pada tahun 2022. Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10 atau 0,14 dari tahun 2022.

Walaupun angka capaian diatas telah memenuhi target (105,12), jumlah kasus kematian bayi diatas masih tergolong tinggi, hal ini masih menjadi catatan bahwa :



Belum optimalnya penanganan kegawatdaruratan neonatal di fasilitas kesehatan
Pola perilaku serta pengasuh bayi baru lahir termasuk pemberian ASI eksklusif dan pemberi makanan tambahan bagi anak yang masih rendah
Kondisi sanitasi lingkungan yang masih kurang sehat, termasuk BABs masih tinggi.

Faktor pendukung :

- Telah dilakukan pemantauan dan pendampingan dari hamil sampai melahirkan
- Semua persalinan diharapkan dilakukan difasilitas Kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan yang berkompensi di bidangnya
- Setiap desa melakukan kelas ibu hamil dimana ibu hamil diberikan edukasi lebih awal sehingga dapat mencegah komplikasi dan menjegah terjadinya kematian bayi.

Sebagian besar kematian bayi yang dapat dicegah masih terjadi di wilayah yang terus menerus berada dalam pengawasan kesehatan dan demografi. Ada kebutuhan untuk meningkatkan perawatan pencegahan di rumah agar ibu dapat mengidentifikasi dan merespons tanda-tanda bahaya. Otopsi verbal dan otopsi sosial dapat dilakukan secara rutin untuk memandu intervensi kebijakan yang bertujuan mengurangi angka kematian bayi



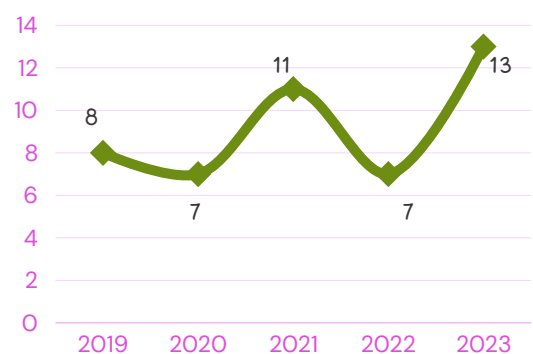
Angka Kematian Ibu (AKI)

World Health Organization (WHO) memiliki beberapa istilah berbeda terkait dengan AKI. Istilah pertama adalah maternal death – atau kematian ibu, yang didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004). Konsep maternal death ini berbeda dengan konsep maternal mortality ratio, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI), jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan maternal mortality ratio/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

• Angka Kematian ibu 2023 :

g. Indikator 1: Kematian Ibu			
Kematian Ibu	13	X 100.000	115,15
Jumlah lahir Hidup	11290		
• Persentase Capaian 2023 :			
(63,00–(115,15–63,00))	X 100	17,22	
63,00			

Grafik 3.4
AKI Kab. Bone Tahun 2019-2023



Dilihat dari grafik diatas menunjukkan AKI di Kabupaten Bone selama periode 5 tahun mengalami penurunan dan peningkatan yang signifikan. Yang menjadi puncak kenaikan angka kematian terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah kematian sebanyak 13.

Dari rekapan data, penyebab kematian ibu di Kabupaten Bone tahun 2023 disebabkan oleh perdarahan, eklamsia , kelainann jantung , Komplikasi non obstetrik , Other puerperal infections dan Kelainan pada cairan dan atau selaput ketuban.

Faktor penghambat

- Belum semua ibu hamil melakukan pemeriksaan secara rutin di Posyandu dan Faskes
- Faktor kesadaran ibu dan keluarga untuk memeriksakan kehamilannya ke fasyankes belum maksimal
- Sarana dan prasarana untuk pemeriksaan bumil belum maksimal
- Masih ada ibu hamil yang melahirkan di rumah
- Tenaga Kesehatan yang masih kurang, sehingga sebarannya belum merata

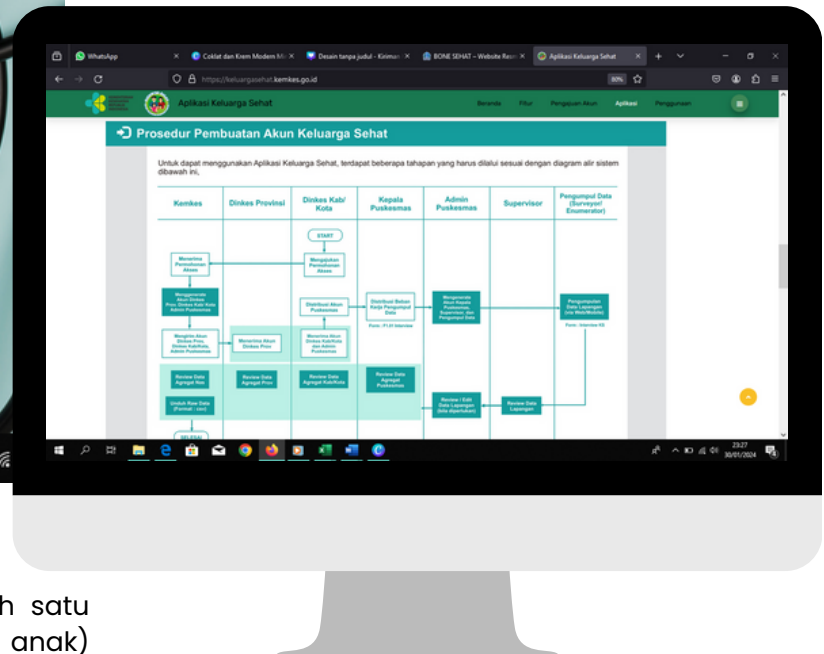
Faktor pendukung :

- Sudah tersedia USG di Fasyankes
- Ambulance sudah tersedia di Desa
- Fasilitas desa untuk peningkatan kompetensi bagi Nakes dan kader dalam penanganan kasus kegawardaruratan .

Dari factor penghambat diatas diharapkan Kerjasama lintas sector, pemerintah setempat untuk memberikan edukasi ke masyarakat khususnya ibu hamil dan keluarga agar rutin melakukan pemeriksaan lebih dini dan berkesinambungan. Diharapkan pula bagi kader yang telah mendapatkan pelatihan agar lebih aktif dalam melakukan pelacakan dan pendataan ibu hamil. Serta diharapkan dukungan dana untuk peningkatan kompetensi bagi Nakes dan kader dalam penanganan kasus kegawardaruratan



Indeks Keluarga Sehat



Yang dimaksud satu keluarga adalah satu kesatuan keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) sebagaimana dinyatakan dalam Kartu Keluarga. Jika dalam satu rumah tangga terdapat kakek dan atau nenek atau individu lain, maka rumah tangga tersebut dianggap terdiri lebih dari satu keluarga. Untuk menyatakan bahwa suatu keluarga sehat atau tidak digunakan sejumlah penanda atau indikator. Dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga

Persentase Capaian Indeks Keluarga Sehat			
Realisasi	0,31	X 100	38,75
Target	0,80		

Indikator utama IKS adalah .

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga. Sedangkan keadaan masing-masing indikator, mencerminkan kondisi PHBS dari keluarga yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pendekatan keluarga ini tiga hal berikut harus diadakan atau dikembangkan, yaitu:

- Instrumen yang digunakan di tingkat keluarga.
- Forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga.
- Keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra Puskesmas.

Derajat kesehatan Kabupaten Bone masih sangat rendah dengan nilai capaian IKS 0,31, hal ini tercermin dalam capaian dua belas indikator keluarga sehat yang dapat diakses melalui barcode diatas. Dari 12 indikator diatas yang capaiannya rendah antara lain masih tingginya keluarga yang tidak mengikuti program KB, masih ada penderita TB Paru , penderita Hipertensi yang tidak berobat sesuai standar. persentase Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan masih tinggi, masih banyak anggota keluarga yang merokok dalam rumah, kepesertaan anggota keluarga menjadi peserta JKN masih belum merata.

Harapan kami kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk membuat kebijakan fundamental untuk menekan tingginya masyarakat yang merokok, dan belum ber-KB. Kepala desa dan Dinas Kesehatan/puskesmas/Bidan Desa agar lebih intensip ke kemasyarakat untuk memantau pelaksanaan 12 indikator keluarga sehat. Data IKS untuk tahun 2022 dapat dilihat dari Aplikasi

<https://keluargasehat.kemkes.go.id/>,

Scan me





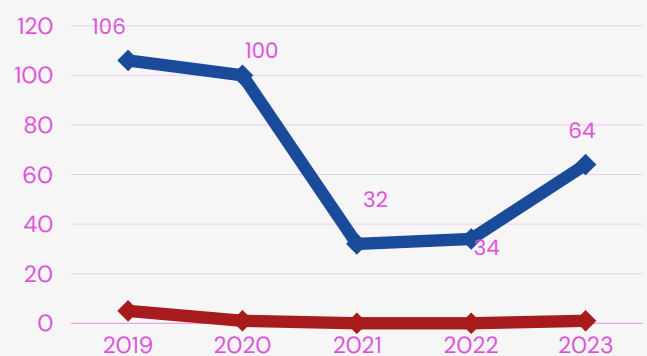
Cakupan Penemuan DBD

Wabah DBD biasanya akan mulai meningkat saat pertengahan musim hujan, hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya tempat-tempat berkembangbiak nyamuk karena meningkatnya curah hujan. Tidak heran jika hampir setiap tahunnya, wabah DBD digolongkan dalam kejadian luar biasa (KLB)

Tabel 3.6
Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bone Tahun 2019–2023

Tahun	Jumlah Kasus	Meninggal
2019	106	5
2020	100	1
2021	32	0
2022	34	0
2023	64	1

Grafik 3.5
Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bone Tahun 2019–2023



Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk. Demam berdarah DBD dulu disebut penyakit “breakbone” karena kadang menyebabkan nyeri sendi dan otot di mana tulang terasa retak. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD di Kabupaten Bone pada tahun 2023 mencapai 100%, hal ini menggambarkan bahwa penderita yang didiagnosa menderita DBD baik itu positif maupun masih gejala ditangani langsung oleh tenaga kesehatan baik di Puskesmas atau Rumah Sakit.



Dari grafik datas terdapat kenaikan jumlah kasus malaria, tahun 2022 terdapat 34 kasus dan 2023 meningkat menjadi 64 dimana 1 meninggal dunia. Tingginya angka kejadian DBD disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti kondisi tempat tinggal, lingkungan, kebiasaan menyimpan pakaian dengan cara digantung, keberadaan vector, status gizi, usia, penggunaan obat anti nyamuk, pengetahuan dan sikap serta Tindakan dalam pencegahannya.

Dalam penanggulangan dan penanganan DBD di Kabupaten Bone dilakukan dengan 3 cara yaitu:

a. Dengan cara kimia.

Cara ini dapat dilakukan untuk nyamuk dewasa maupun larva. Untuk nyamuk dewasa saat ini dilakukan dengan cara pengasapan (thermal fogging) atau pengabutan (cold fogging = Ultra Low Volume). Pemberantasan nyamuk dewasa tidak menggunakan cara penyemprotan pada dinding (residual spraying) karena nyamuk *Ae. aegypti* tidak suka hinggap pada dinding, melainkan pada benda-benda yang tergantung seperti kelambu dan pakaian yang tergantung. Untuk pemakaian di rumah tangga dipergunakan berbagai jenis insektisida yang disemprotkan di dalam kamar-kamar atau ruangan misalnya, golongan organophosphat atau pyrethroids synthetic.

b. Dengan cara fisik / lingkungan.

Pembersihan sarang nyamuk (PSN). Cara ini dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi tempat-tempat perindukan. Cara ini dikenal sebagai Pembersihan Sarang Nyamuk (PSN) yang pada dasarnya ialah pemberantasan jentik atau mencegah agar nyamuk tidak dapat berkembang biak.

c. Dengan cara biologis

Memelihara ikan Menanam tanaman di halaman rumah yang tidak disukai nyamuk seperti sereh, lavender dan lainnya

d. Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik

Juru pemantau jentik atau Jumantik adalah orang yang melakukan pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk khususnya *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Gerakan 1 rumah 1 jumantik adalah peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga dalam pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk untuk pengendalian penyakit tular vektor khususnya DBD melalui pembudayaan PSN 3M PLUS, dimana setiap rumah itu ada satu juru pemantau jentik



» Angka Kejadian Malaria

Penularan malaria ini pun disebabkan oleh gigitan nyamuk yang mengalami infeksi parasit. Sejak dimulai lebih dari 5 dasawarsa lalu, upaya pengendalian malaria di Indonesia telah membuahkan hasil. Keberhasilan tersebut ditandai dengan terus menurunnya angka kejadian malaria atau annual parasite incidence (API) secara nasional sampai hanya 0,85 per 1.000 pada 2015. Tahun 2023 terdapat 54 kasus (0,06) Angka tersebut diambil dari :



Kasus Malaria : 54
Jumlah Penduduk : 819590

Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria.

Dari jumlah kasus diatas penderita mendapatkan kesakitan malaria pada pekerja migrasi, khusus bagi yang memiliki anggota keluarga sebagai pekerja migrasi. Keberadaan anggota keluarga sebagai pekerja migrasi ke daerah endemis malaria, merupakan factor risiko terjadinya kesakitan malaria di wilayah Kabupaten Bone. Terdapat hubungan bermakna antara keberadaan anggota keluarga yang jadi pekerja migrasi dengan keberadaan oarasit malaria pada anggota keluarganya (kasus indigenous yang berasal dari kasus malaria impor). Kabupaten Bone bukan termasuk daerah yang dinyatakan endemis Malaria.

Pencegahan kejadian malaria di Kabupaten Bone sama dengan pencegahan DBD yaitu melakukan fooging di tempat yang dianggap rawan terjadi malaria. Selain dari pada fooging pencegahannya (Promotif) dilakukan penyuluhan ke masyarakat dan sekolah. Jumlah kasus Malaria di Kabupaten Bone adalah penyakit import, dimana penderita berasal dari luar Kabupaten Bone.





Prevalensi HIV / AIDS (per 1000 penduduk)



Penyakit infeksi HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan yang serius dewasa ini. Di Indonesia sudah merupakan ancaman dan dalam 10 tahun terakhir merupakan the emerging infectious disease. Diagnosis infeksi HIV/AIDS ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium dengan petunjuk gejala klinis atau adanya perilaku beresiko tinggi. Data diatas merupakan kasus import. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang bekerja di luar Kabupaten Bone. Dan pada tahun 2023 terdapat 95 kasus, dimana kasus yang ditemukan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2022) yaitu 87 kasus.



Penerapan Permenkes No. 21 Tahun 2013 untuk daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tes HIV wajib ditawarkan kepada semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan. Di daerah epidemi HIV rendah, penawaran tes HIV diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB

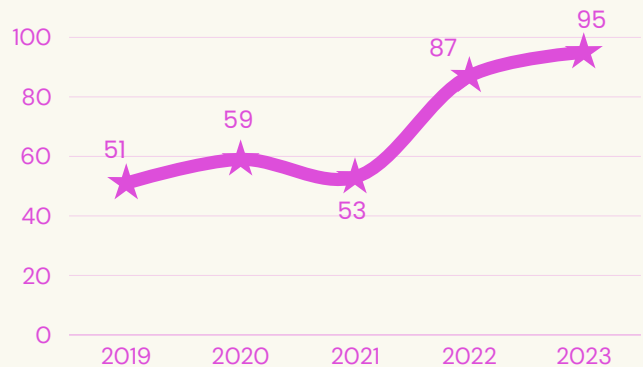


Kementerian Kesehatan menerapkan sistim Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) dan telah diterapkan pula di Kabupaten Bone. LKB merupakan suatu model layanan terpadu yang melibatkan semua unsur layanan baik dari sektor kesehatan primer, sekunder hingga tersier dan layanan dari sektor lain yang terkait dengan kebutuhan ODHA, termasuk keterlibatan dari komunitas. LKB bertujuan untuk mendekatkan dan memperkuat sistem layanan kesehatan hingga menjamin ketersediaan layanan komprehensi dan berkesinambungan. Adapun yang dimaksud dengan layanan komprehensif adalah layanan yang mencakup semua kebutuhan ODHA seperti tergambar pada Bagan 1 di bawah ini. Sedang layanan berkesinambungan adalah layanan yang terhubung dari satu titik layanan ke titik layanan lain dengan sistem rujukan yang efektif sepanjang hayat.

Tabel 3.7
Jumlah Kasus Positiv HIV di Kabupaten Bone
Tahun 2019–2023

Tahun	Jumlah Kasus
2019	51
2020	59
2021	53
2022	87
2023	95

Grafik 3.6
Jumlah Kasus Positiv HIV di Kabupaten Bone
Tahun 2019–2023



Dari tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa angka Positiv HIV di Kabupaten Bone setiap tahun, dimulai dari tahu 2019 (51) sampai 2023 (95) mencapai 44 kasus. Jumlah kasus HIV di Kabupaten Bone menurut faktor risiko menunjukkan bahwa LSL menyumbang sebanyak 78 kasus.

Pemahaman mendalam terhadap karakter dan pola interaksi kelompok beresiko masih belum maksimal. Situasi ini mempengaruhi pengemasan dan format pesan penanggulangan HIV dan AIDS menjadi kurang pas.

Oleh Kementerian Kesehatan dan telah diterapkan pula di Kabupaten Bone menerapkan strategi akselerasi Suluh, Temukan, Obati dan Pertahankan (STOP). Suluh dilaksanakan melalui edukasi yang menargetkan sekitar 90% masyarakat paham HIV; Temukan dilakukan melalui percepatan tes dini dan diharapkan sekitar 90% ODHA tahu statusnya; Obati dilakukan untuk mencapai 90% ODHA segera mendapat terapi ARV; dan Pertahankan yakni 90% ODHA yang ART tidak terdeteksi virusnya.

Dukungan lintas program, lintas serta masyarakat, sehingga Kesuksesan mengatasi kasus HIV-AIDS dapat terwujud dengan didukung akses layanan kesehatan berkualitas tinggi, upaya pencegahan, pendampingan dan dukungan tanpa adanya stigma dan diskriminasi

Safer for your health





Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan



B

Berdasar Peraturan Menteri Kesehatan No 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional.

Puskesmas sebagai salah satu FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang difungsikan sebagai gate-keeper dalam pelayanan kesehatan. Puskesmas dituntut untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, berkualitas, dan memuaskan masyarakat. Untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas, serta dapat memuaskan masyarakat, maka seluruh sumber daya yang ada sebagai input dalam pelayanan harus dikelola secara baik menggunakan prinsip “prinsip manajemen, yang dimulai sejak saat perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan penilaian untuk menghasilkan output yang efektif dan efisien pada semua kegiatan di puskesmas. Salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan puskesmas dilakukan dengan akreditasi. Dengan implementasi standar akreditasi akan menjamin manajemen puskesmas, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis telah dilakukan secara berkesinambungan. Dari 38 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bone telah dilakukan Akreditasi dimana melalui akreditasi, diharapkan manajemen Puskesmas dapat menerapkan Prosedur Standar dengan baik sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kualitas yang diberikan oleh Puskesmas, akan menimbulkan persepsi pasien terhadap pelayanan yang diberikan kepadanya.

SCAN



Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

6. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.8
Efisiensi Anggaran Tahun 2019-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisa si	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Prosentase Balita Gizi Buruk	0,7	0,1	184,28	374.342.989.656	307.136.632.973	82,04	102,23
	Persentase Balita Stunting	100	100	100				17,95
	Cakupan Desa / Kelurahan Sehat	7,27	3,28	154,88				72,83
	Angka Kematian Bayi	6,44	6,11	190,53				108,48
	Angka Kematian Ibu	63	97,43	45,34				-36,71
	Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,31	38,75				-43,30
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100	100	100				17,95
	Angka Kejadian Malaria (per 1000 penduduk)	<1	0,006	100				17,95
	Prevalensi HIV/AIDS (per1000 penduduk)	<0,05	0,01	100				17,95
	Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi	100	100	100				17,95

Sumber Data: Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2023

pada tabel diatas menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik, meskipun anggaran tidak dapat terserap 100%. Semua sub kegiatan sudah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Analisa Terhadap Program dan Kegiatan Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Sasaran	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100	100	100	
	Prosentase Balita Gizi Buruk	184,28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (Underweight) pada anak Balita (%)	0,70	0,10	184,28	
	Persentase Balita Stuning	154,88		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada anak dibawah lima tahun (%)	7,27	3,28	154,88	
	Cakupan Desa / Kelurahan Sehat	100	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Laporan penyelenggaraan KKS tersedia	100	100	100	
	Angka Kematian Bayi	190,53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	6,44	6,11	190,53	
	Angka Kematian Ibu	45,34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	63,00	97,43	45,34	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				
	Indeks Keluarga Sehat	38,75	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS PK dan Perkesmas (Puskesmas)	0,80	0,31	38,75	
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penemuan dan penanggulangan penyakit DBD (Inciden Rate)per.100.000 pddk	100	100	100	
	Angka Kejadian Malaria (per 1000 penduduk)	100		API (Annual Parasit Infection) Malaria < 1 per.1000 Pddk	<1	0,006	100	
	Prevalensi HIV/AIDS (per1000 penduduk)	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubu manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan	<0,05	0,01	100	
	Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi	100	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	100	100	100	





Upaya Perbaikan Berikutnya

Tujuan : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif

Sasaran : Membaiknya Layanan Kesehatan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja tahun berikutnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan bagi pelaksana program pembangunan kesehatan yang dilakukan secara konsisten yang diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholder* pembangunan kesehatan. Komunikasi yang insentif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan kesehatan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone. Dalam mewujudkan hal tersebut, ada beberapa uapaya yang harus dilakukan yaitu :

- 
- 
- Menciptakan tata kelola perencanaan pembangunan kesehatan yang didukung sumber daya kesehatan yang optimal
 - Mewujudkan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang berkualitas didukung sarana dan prasarana yang optimla
 - Mewujudkan keluarga sehat yang mandiri melalui promosi kesehatan, peningkatan status gizi dan jaminann pemeliharaan kesehatan yang menyeluruh
 - Mewujudkan upaya perlindungan kesehatan bagi bayi, ibu hamil, ibu melahirkan, anak sekolah serta upaya peningkatan sarana sanitasi dasar masyarakat.
 - Meningkatkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat
 - Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular , tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi , pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penganggulangan KLB/ wabah dan krisis masalah kesehatan

8. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Dinas Kesehatan pada Tahun 2023 sebesar 82,04% dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp.07.136.632.973 dari pagu Rp. 374.342.989.656 . Jika dilihat dari realisasi anggaran per program, penyerapan anggaran terbesar pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 99.51% (dari anggaran sebesar Rp. 72.000.621.167 ,- terealisasi Rp. 71.636.143.616,-). Sedangkan penyerapan terkecil pada Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sebesar 51.59% (dari anggaran sebesar Rp. 335.122.000 ,- terealisasi Rp. 172.901.500,-).

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023

Program	Pagu	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72.000.621.167	71.636.143.616	99,49
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	295.111.908.568	230.741.437.857	78,19
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.134.947.991	2.108.115.200	67,25
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	335.122.000	172.901.500	51,59
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.760.389.930	2.478.034.800	65,90
Jumlah	374.342.989.656	307.136.632.973	82,04

Catatan : Anggaran adalah anggaran sasaran Perangkat Daerah 2023

Pada tabel diatas menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik, meskipun anggaran tidak dapat terserap 100%. Kondisi keuangan Pemerintah Daerah tidak mampu memenuhi pembayaran pertanggungjawaban kegiatan samapi batas akhir tahun 2023, sehingga beberapa kegiatan Belanja Modal menyeberang tahun dan dicatat sebagai UTANG kepada Pihak Ke-3 yang kemdian akan dibayarka di Tahun 2024 pada Dokumen DPA-Parsial.



Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
Membaiknya Layanan Kesehatan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat	1. Persentase Balita Stunting 2. Angka Kematian Bayi 3. Angka Kematian Ibu 4. Persentase Balita Gizi Buruk 5. Cakupan Desa dan Kelurahan Sehat 6. Indeks Keluarga Sehat 7. Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit DBD 8. Angka Kejadian Malaria 9. Prevalensi HIV/AIDS 10. Persentase terakreditasi	1. Cakupan Desa / Kelurahan Sehat (100) 2. Angka Kematian Ibu (45,34) 3. Indeks Keluarga Sehat (38,75) 4. Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit DBD (100) 5. Angka Kejadian Malaria (100) 6. Prevalensi HIV/AIDS 7. Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi (100)	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (78,19) 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (67,25) 3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (51,59) 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (65,90)	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (5,25) 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (16,19) 3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (31,85) 4. Program pemberdayaa masyarakat bidang kesehatan (17,54)

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran strategis dengan indikator berpredikat sangat baik dan indikator berpredikat sangat rendah dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran "Membaiknya Layanan Kesehatan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat" telah mencukupi dan ada efisiensi anggaran.



Kesimpulan



LKjIP sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2023, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Bone tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran dinas kesehatan kesehatan “Membaiknya Layanan Kesehatan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat”, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2023, 3 (tiga) indikator sasaran yang telah memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori sangat baik. Sementara itu, ada 2 (dua) indikator sasaran belum memenuhi target dengan predikat sangat rendah. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kendala.
2. Dari analisis indikator program, semua indikator program dapat dicapai sesuai target. Hal ini menunjukkan keberhasilan program yang telah ditargetkan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2023.
3. Realisasi kinerja anggaran (keuangan) Dinas Kesehatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 82,04% dengan predikat Baik

Langkah-langkah/ Strategi yang akan diambil Dinas Kesehatan yang dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sesuai kompetensinya dalam memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan
- Pengupayakan Pengadaan Obat dan BMHP secara maksimal termasuk obat dan BMHP program
- Pengadaan Alkes untuk memenuhi kekurangan Alkes pada sarana Pelayanan kesehatan tingkat pertama, rujukan dan Laboratorium Kesehatan Daerah
- Mengupayakan regulasi baik pemerintah Kabupaten dan desa terkait penerapan PHBS

Lampiran-Lampiran



Sebagai informasi yang sah, kami lampirkan data dukung capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kab. Bone Tahun 2023

Data Dukung	Barcode
Renstra Perubahan	
Renja 2024	
Rencana Aksi 2024	
SK IKU	
Perjanjian Kinerja 2024	
Perjanjian Kinerja Perubahan_2023	
Pengukuran Kinerja	
Cascading	
Pohon Kinerja	